

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar terlampir.

Visi KOTA BIMA Tahun 2005 – 2025 adalah “Terwujudnya Kota Bima sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan”, dan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima Tahun 2013 – 2018 adalah **“TERWUJUDNYA KOTA BIMA YANG TANGGUH DAN MANDIRI MELALUI PENANGANAN BENCANA YANG TANGGAP, CEPAT DAN TEPAT”**, maka untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima menyusun Renja SKPD Tahun 2018. Renja SKPD ini diharapkan dapat terealisasi maksimal dalam KUA dan PPAS untuk kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD tahun 2018.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang- Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4727);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara nomor 4828);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2008 Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 – 2028.
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor );

19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 111 );
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018.
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima;
21. Keputusan Walikota Bima Nomor 506 Tahun 2012 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun lalu, dan perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima tahun 2018.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2018.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima Tahun 2016, meliputi :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

## **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun 2017 \*(tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.





Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan  
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima**

No	URUSAN /BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Resntra SKPD pada Tahun 2013-2018			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Pada Tahun berjalan yang dievaluasi (2017)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun... %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD sd tahun 2017		
	Program/Kegiatan		5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14=6+12				
1	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya pelayanan admintrasi perkantoran	10 0	%	2.940.384 .043	67	%		739 .299.70 0	6	%	194.903.699, 00	2 6,35	%	26,3 6	72,60	%
							1.488.064.53 3,00										
2	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Jasa surat menyurat	60	Bulan	233.94 7.432	36	Bulan	152.592.000, 00	79 .180.00 0	3	Bulan	9.540.000,00	2 5,00	%	4,0 8	39,00	Bulan

3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik	60	Bulan	124.54 4.040	36	Bulan
							88.993.939,00
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	50	Unit	60.00 0.000	24	Unit
							18.688.283,00
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	60	Bulan	295.68 2.203	36	Bulan
							197.570.000,00

12	Bulan	.400.00 0	44	3	Bulan	3.821.265,00	2 5,00	%	3,0 7	39,00	Bulan			
11	Unit	.450.00 0	14	1	Unit	0,00	9,09	%	-	25,00	Unit			
12	Bulan	.400.00 0	83	3	Bulan	0,00	2 5,00	%	-	39,00	Bulan			

6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	60	Bulan	83.56 6.608	36	Bulan	62.772.500,00	12	Bulan	15 .382.00 0	3	Bulan	3.113.000,00	2 5,00	%	3,7 3	39,00	Bulan
7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis kantor	60	Bulan	221.00 0.000	36	Bulan	124.669.850,00	12	Bulan	47 .049.90 0	3	Bulan	6.062.500,00	2 5,00	%	2,7 4	39,00	Bulan
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetaka dan penggandaan	60	Bulan	72.04 0.180	36	Bulan	72.533.000,00	12	Bulan	26 .240.00 0	3	Bulan	11.740.000,00	2 5,00	%	16,3 0	39,00	Bulan

9	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	Paket	40.00 0.000	3	Paket	
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	25	Jenis	16.00 0.000	21	Jenis	
12	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	42 00	OK	87.91 3.440	2.5 20	OK	
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang bisa dilakukan	60	Bulan	1.605.690 .140	36	Bulan	

23.217.360,00

4.830.800,00

68.995.000,00

633.881.801,00

1	Paket	.029.00 <sup>8</sup> 0	1	Paket	4.226.000,00	100 ,00	%	10,5 7	4,00	Paket
7	Jenis	.498.00 <sup>3</sup> 0	7	Jenis	3.498.000,00	100 ,00	%	21,8 6	28,00	Jenis
840	OK	.000.00 <sup>27</sup> 0	105	OK	0,00	1 2,50	%	-	##### #	OK
12	Bulan	360 .670.80 0	3	Bulan	152.902.934, 00	2 5,00	%	9,5 2	39,00	Bulan

14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang bisa dilakukan	60	Bulan	100.00 0.000	36	Bulan	39.320.000,0 0	12	Bulan	30 .000.00 0	3	Bulan	0,00	2 5,00	%	-	39,00	Bulan
15	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Porsentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	10 0	%	1.367.275 .194	63	%	1.293. 380.350	57	%	491.276 .000	7	%	17.005.000,0 0	1 2,85	%	1,2 4	70,47	%
16	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor	30	Paket	360.30 0.000	7	Paket	575. 320.000	1	Paket	152 .550.00 0	-	Paket	0,00	-	%	-	7,00	Paket

17	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	20	Jenis	201.46 8.300	10	Jenis	254.000 <sup>60.</sup>	3	Jenis	21.150.000,00	-	Jenis	0,00	-	%	-	10,00	Jenis
18	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	25	Jenis	219.17 3.090	15	Jenis	617.000 <sup>93.</sup>	5	Jenis	41 .650.00 0	-	Jenis	0,00	-	%	-	15,00	Jenis
19	Pengadaan mebelair	Jumlah Mebeleur	15	Jenis	235.04 6.350	9	Jenis	675.000 <sup>92.</sup>	4	Jenis	31 .500.00 0	-	Jenis	0,00	-	%	-	9,00	Jenis

20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah paket Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5	Tahun	61.05 1.000	3	Tahun	29. 750.000	1	Tahun	31 .650.000	-	Tahun	0,00	-	%	-	3,00	Tahun
21	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah paket Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	45	Unit	237.73 2.594	30	Unit	386. 314.350	13	Unit	172 .276.000	-	Unit	14.005.000,0 0	-	%	5,8 9	30,00	Unit
22	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah paket Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	60	Bulan	52.50 3.860	36	Bulan	55. 450.000	33	Unit	40 .500.000	4	Unit	3.000.000,00	1 2,12	%	5,7 1	40,00	Unit

23	Program peningkatan kedisiplinan aparatur	Prosentase peningkatan disiplin aparatur	100	%	200.000.000	61	%	62.000.000	25	%	30.400.000,00	-	%	0,00	-	%	-	60,60	%	
24	Pengadaan pakaian kerja lapangan		150	Set	50.000.000	90	-	18.000.000										90,00		
25	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Junlah pakaian khusus hari - hari tertentu	150	Set	150.000.000	90	Set	44.000.000	38	Set	30.400.000	-	Set	0,00	-	%	-	90,00	Set	



26	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase berkembangnya sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	310.99 3.794	62	%	174.218.000,00	33	%	95 .390.000	20	%	0,00	6 0,00	%	-	81,80	%
27	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	10	Dok	60.07 4.184	6	Dok	25.219.000,00	2	dok	7 .220.000	-	dok	0,00	-	%	-	6,00	dok
28	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun	15	Dok	60.07 4.184	9	Dok	27.964.500,00	3	Dok	12.080.000	-	Dok	0,00	-	%	-	9,00	Dok

29	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Rencana kerja tahunan /RKA/DPA SKPD	20	Dok	133.33 5.384	12	Dok	89.110.000,0 0	4	dok	51 .650.00 0	-	dok	0,00	-	%	-	12,00	dok
30	Penyusunan LAKIP, LPJ, dan LPPD	Jumlah Dokumen Lakip, LPJ dan LPPD	15	Dok	57.51 0.042	9	Dok	31.924.500,0 0	3	dok	24 .440.00 0	3	dok	0,00	100 ,00	%	-	12,00	dok
31	<b>Program penataan peraturan perundang-undangan</b>	Jumlah aturan Daerah	10	Dok	150.72 1.000	7	Dok	<b>180. 990.700</b>	1	dok	<b>31.570. 000,00</b>	-	%	0,00	-	%	-	7,00	%

32	Penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah	Jumlah Dokumen yang disusun dan dilegalisasi	10	Dok	150.72 1.000	7	Dok	180. 990.700	1	Perwali	31 .570.00 0	-	Perwali	0,00	-	%	-	7,00	Perwali
33	Program penyuluhan dan penanggulangan bencana	Jumlah SDM yang terlatih	14 60	Orang	2.276.977 .867	1.0 92	Orang	1.798. 943.529	380	Orang	##### ##### ###	-	%	0,00	-	%	-	##### #	%
34	Diklat dan Penyuluhan kepada SKPD terkait;	Jumlah Personil SKPD terkait terlatih	20 0	Orang	238.44 0.785	80	Orang	222. 745.121	40	Orang	64 .208.30 0	-	Orang	0,00	-	%	-	80,00	Orang

35	Diklat dan Penyuluhan kepada anggota masyarakat (tatap muka, brosur, leaflet)	Jumlah personil pada Cifitas Pendidikan terlatih	620	Orang	324.870.000	440	Orang	114.144.200	20	orang	65.482.200	-	orang	0,00	-	%	-	440,00	orang
36	Diklat dan penyuluhan kepada Tim Penanggulangan Bencana (TRC, TAGANA, TIM SAR, TIM PEMADAM KEBAKARAN)	Jumlah Tim Penanggulangan bencana terlatih	310	Orang	463.667.082	50	Orang	48.337.500	120	Orang	97.982.700	-	Orang	0,00	-	%	-	50,00	Orang
37	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah Lembaga dan Personilnya terlatih	20	Lembaga	1.250.000.000	12	Lembaga	1.413.716.708	4	Lembaga	851.439.500	-	Lembaga	0,00	-	%	-	12,00	Lembaga

38	Program Penanggulangan Bencana/Pencegahan Bencana	Persentase pengurangan risiko akibat bencana	100	%	3.033.951.648	34	%	1.045.455.000	36	%	200.500.000	-	%	0,00	-	%	-	34,38	%
39	Mitigasi Bencana	Jumlah sarana dan prasarana	32	Paket	3.033.951.648	11	Paket	1.045.455.000	4	paket	200.500.000	-	paket	0,00	-	%	-	11,00	paket
50	Program peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	90	%	108.102.000	54	%	88.018.000	18	%	40.000.000,00	-	%	0,00	-	%	-	54,00	%

41	Pengadaan sarana prasarana dan penunjang dalam rangka upaya penanggulangan bencana	Jumlah sarana dan prasarana	10	Jenis	108.10 2.000	6	Jenis	88. 018.000	2	Jenis	40 .000.00 0	-	Jenis	0,00	-	%	-	6,00	Jenis
41	Program pengkajian secara cepat dan tepat	Jumlah Dokumen	5	Dok	317.44 1.241	3	Dok	79. 447.500	2	dok	85.042. 500,00	-	dok	0,00	-	%	-	3,00	dok
43	Analisa cakupan lokasi dan jumlah korban	Jumlah Data	5	Dok	164.28 8.241	3	Dok	79. 447.500	1	dok	45 .730.00 0	-	dok	0,00	-	%	-	3,00	dok

44	Analisa kerusakan sarana dan prasarana	Jumlah Dokumen	5	Dok	153.15 3.000	-	Dok	-	1	dok	39 .312.50 0	-	dok	0,00	-	%	-	-	dok
45	<b>Program pemenuhan kebutuhan dasar</b>	Jumlah Kebutuhan dasar	10 0	%	805.87 3.000	64	%	197. 989.500	31	%	90.390. 000,00	-	%	0,00	-	%	-	64,00	%
46	Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi	Jumlah air bersih dan Sanitasi	40	Titik	732.61 2.000	24	Titik	121. 041.000	8	titik	51 .330.00 0	-	titik	0,00	-	%	-	24,00	titik
47	Pemenuhan sandang dan pangan	Jumlah Sandang dan pangan	10	Jenis	73.26 1.000	8	Jenis	76. 948.500	2	Jenis	39 .060.00 0	-	Jenis	0,00	-	%	-	8,00	Jenis





51	Program Rekonstruksi	Prosentase Rekonstruksi sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	40	%	50.300.000.000	0,71	%	967.799.424	9,00	%	12.052.315.000	-	%	0,00	-	%	-	0,71	%
52	Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	100	Keg	300.000.000	71	Keg	899.544.800	20	Keg	52.315.000	-	Keg	0,00	-	%	-	71,00	Keg
53	Pembangunan sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana umum	50	Paket	50.000.000.000	-	Paket	68.254.624	11	Paket	12.000.000.000	-	Paket	0,00	-		-	-	Paket

54	Program Kesiapsiagaan	Persentase ketersediaan sistem kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	100	%	1.762.632.022	54	%	1.012.130.000	13	%	536.866.100,00	-	%	0,00	-	%	-	54,13	%
55	Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana		1	Dok	50.000.000	1	Dok	11.709.500	0									1,00	
56	Gladi tentang mekanisme tanggap darurat	Jumlah SDM terlatih dan mekanisme kedaruratan yang teruji	100	Orang	330.194.333	50	Orang	97.579.500	30	Orang	40.787.900	-	Orang	0,00	-	%	-	50,00	Orang

57	Pembentukan Kelurahan Tangguh	Jumlah kelurahan tangguh bencana	38	Kel	1.432.437.689	20	Kel	902.841.000	5	Kel	496.078.200	-	Kel	0,00	-	%	-	20,00	Kel
58	Program Peringatan dini	Persentase ketersediaan system peringatan Dini bencana	100	%	729.892.805	68,77	%	364.238.726	23	%	264.985.300,00	9	%	12.250.000,00	37,17	%	1,68	77,34	%
59	Mengamati gejala bencana	Jumlah data hasil pengamatan	5	Dok	116.025.000	1	Dok	23.759.726	1	dok	82.110.300	-	dok	0,00	-	%	-	1,00	dok

60	Menyebar luaskan informasi potensi bencana	Jumlah jenis penyebaran informasi	35	Paket	613.86 7.805	24	Paket	340. 479.000	8	jenis media penyebaran	182 .875.00 0	3	jenis media penyebaran	12.250.000,0 0	3 7,50	%	2,0 0	27,00	jenis media penyebaran
			87, 14	%	103.647.340.54 4,00	52, 05	%	9.841.889.06 2,00	26,05	%	##### ##### ###	2,98	%	226.228.699, 00	11,44	%	0,2 2	55,03	%

No	KODE	URUSAN /BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Resntra SKPD pada Tahun 2013-2018	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Pada Tahun berjalan yang die (2017)
		Program/Kegiatan				

1	2	3	4	5			6			7			
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	
1	4.01.4.01.14.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Persentase tersedianya pelayanan admintrasi perkantoran	100	%	2.940.384.043	67	%	<b>1.488.064.533,00</b>	22	%	770	
2	4.01.4.01.14.01.01		Jumlah Jasa surat menyurat	60	Bulan	233.947.432	36	Bulan		152.592.000,00	12	Bulan	00
3	4.01.4.01.14.01.02		Jumlah Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	60	Bulan	124.544.040	36	Bulan		88.993.939,00	12	Bulan	00
4	4.01.4.01.14.01.06		Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	50	Unit	60.000.000	24	Unit		18.688.283,00	11	Unit	00
5	4.01.4.01.14.01.07		Jumlah jasa administasi keuangan	60	Bulan	295.682.203	36	Bulan		197.570.000,00	12	Bulan	00
6	4.01.4.01.14.01.08		Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	60	Bulan	83.566.608	36	Bulan		62.772.500,00	12	Bulan	00
7	4.01.4.01.14.01.10		Jumlah Alat Tulis kantor	60	Bulan	221.000.000	36	Bulan		124.669.850,00	12	Bulan	90
8	4.01.4.01.14.01.11		Jumlah Barang cetaka dan penggandaan	60	Bulan	72.040.180	36	Bulan		72.533.000,00	12	Bulan	00

9	4.01.4.01.14.01.12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	Paket	40.000.000	3	Paket	23.217.360,00	1	Paket	00	
10	4.01.4.01.14.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	25	Jenis	16.000.000	21	Jenis		4.830.800,00	7	Jenis	00
12	4.01.4.01.14.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	4200	OK	87.913.440	2.520	OK		68.995.000,00	840	OK	00
13	4.01.4.01.14.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang bisa dilakukan	60	Bulan	1.605.690.140	36	Bulan		633.881.801,00	12	Bulan	380
14	4.01.4.01.14.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang bisa dilakukan	60	Bulan	100.000.000	36	Bulan		39.320.000,00	12	Bulan	00
15	4.01.4.01.14.02	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	Porsentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100	%	1.367.275.194	63	%		<b>1.293.380.350</b>	57	%	491.276.
16	4.01.4.01.14.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor	30	Paket	360.300.000	7	Paket	575.320.000	1	Paket	100	

17	4.01.4.01.14.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	20	Jenis	201.468.300	10	Jenis	60.254.000	3	Jenis	21.150.000
18	4.01.4.01.14.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	25	Jenis	219.173.090	15	Jenis	93.617.000	5	Jenis	000
19	4.01.4.01.14.02.10	Pengadaan mebelair	Jumlah Mebeleur	15	Jenis	235.046.350	9	Jenis	92.675.000	4	Jenis	000
20	4.01.4.01.14.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah paket Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5	Tahun	61.051.000	3	Tahun	29.750.000	1	Tahun	000
21	4.01.4.01.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah paket Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	45	Unit	237.732.594	30	Unit	386.314.350	13	Unit	1000
22	4.01.4.01.14.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah paket Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	60	Bulan	52.503.860	36	Bulan	55.450.000	33	Unit	000
23	4.01.4.01.14.03	<b>Program peningkatan kedisiplinan aparatur</b>	Prosentase peningkatan disiplin aparatur	100	%	200.000.000	61	%	<b>62.000.000</b>	25	%	<b>30.400.000</b>
24		Pengadaan pakaian kerja lapangan		150	Set	50.000.000	90	-	18.000.000			
25	4.01.4.01.14.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Junlah pakaian khusus hari - hari tertentu	150	Set	150.000.000	90	Set	44.000.000	38	Set	000

26	4.01.4.01.14.06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Prosentase berkembangnya sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	310.993.794	62	%	<b>174.218.000,00</b>	33	%	00
27	4.01.4.01.14.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	10	Dok	60.074.184	6	Dok	25.219.000,00	2	dok	00
28	4.01.4.01.14.06.04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun	15	Dok	60.074.184	9	Dok	27.964.500,00	3	Dok	12.080.0
29	4.01.4.01.14.06.05	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Rencana kerja tahunan /RKA/DPA SKPD	20	Dok	133.335.384	12	Dok	89.110.000,00	4	dok	00
30	4.01.4.01.14.06.06	Penyusunan LAKIP, LPJ, dan LPPD	Jumlah Dokumen Lakip, LPJ dan LPPD	15	Dok	57.510.042	9	Dok	31.924.500,00	3	dok	00
31	4.01.4.01.14.07	<b>Program penataan paraturan perundang-undangan</b>	Jumlah aturan Daerah	10	Dok	150.721.000	7	Dok	<b>180.990.700</b>	1	dok	<b>31.570.0</b>



32	4.01.4.01.14.07.01	Penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah	Jumlah Dokumen yang disusun dan dilegalisasi	10	Dok	150.721.000	7	Dok	180.990.700	1	Perwali	00
33	4.01.4.01.14.08	<b>Program penyuluhan dan penanggulangan bencana</b>	Jumlah SDM yang terlatih	1460	Orang	2.276.977.867	1.092	Orang	<b>1.798.943.529</b>	380	Orang	1.079.110
34	4.01.4.01.14.08.01	Diklat dan Penyuluhan kepada SKPD terkait;	Jumlah Personil SKPD terkait terlatih	200	Orang	238.440.785	80	Orang	222.745.121	40	Orang	30
35	4.01.4.01.14.08.02	Diklat dan Penyuluhan kepada anggota masyarakat (tatap muka,brosur,leaflet)	Jumlah personil pada Cifitas Pendidikan terlatih	620	Orang	324.870.000	440	Orang	114.144.200	20	orang	20
36	4.01.4.01.14.08.03	Diklat dan penyuluhan kepada Tim Penanggulangan Bencana (TRC,TAGANA,TIM SAR, TIM PEMADAM KEBAKARAN)	Jumlah Tim Penanggulangan bencana terlatih	310	Orang	463.667.082	50	Orang	48.337.500	120	Orang	70
37	4.01.4.01.14.08.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah Lembaga dan Personilnya terlatih	20	Lembaga	1.250.000.000	12	Lembaga	1.413.716.708	4	Lembaga	850

38	4.01.4.01.14.09	<b>Program Penanggulangan Bencana/Pencegahan Bencana</b>	Persentase pengurangan risiko akibat bencana	100	%	3.033.951.648	34	%	<b>1.045.455.000</b>	36	%	200
39	4.01.4.01.14.09.01	Mitigasi Bencana	Jumlah sarana dan prasarana	32	Paket	3.033.951.648	11	Paket	1.045.455.000	4	paket	200
50	4.01.4.01.14.10	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana</b>	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	90	%	108.102.000	54	%	<b>88.018.000</b>	18	%	<b>40.000.000</b>
41	4.01.4.01.14.10.01	Pengadaan sarana prasarana dan penunjang dalam rangka upaya penanggulangan bencana	Jumlah sarana dan prasarana	10	Jenis	108.102.000	6	Jenis	88.018.000	2	Jenis	00
41	4.01.4.01.14.11	<b>Program pengkajian secara cepat dan tepat</b>	Jumlah Dokumen	5	Dok	317.441.241	3	Dok	<b>79.447.500</b>	2	dok	<b>85.042.500</b>
43	4.01.4.01.14.11.01	Analisa cakupan lokasi dan jumlah korban	Jumlah Data	5	Dok	164.288.241	3	Dok	79.447.500	1	dok	00
44	4.01.4.01.14.11.02	Analisa kerusakan sarana dan prasarana	Jumlah Dokumen	5	Dok	153.153.000	-	Dok	-	1	dok	50
45	4.01.4.01.14.12	<b>Program pemenuhan kebutuhan dasar</b>	Jumlah Kebutuhan dasar	100	%	805.873.000	64	%	<b>197.989.500</b>	31	%	<b>90.390.000</b>
46	4.01.4.01.14.12.01	Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi	Jumlah air bersih dan Sanitasi	40	Titik	732.612.000	24	Titik	121.041.000	8	titik	00

47	4.01.4.01.14.12.02	Pemenuhan sandang dan pangan	Jumlah Sandang dan pangan	10	Jenis	73.261.000	8	Jenis	76.948.500	2	Jenis	00	
48	4.01.4.01.14.13	<b>Program Rehabilitasi</b>	Prosentase rehabilitasi sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	80	%	39.343.095.930	49	%	<b>1.089.213.800,00</b>	16	%	83.230.000	
49		<b>Perbaikan sarana dan prasarana</b>		11	Paket	1.000.000.000	11	Paket		899.544.800,00			
50	4.01.4.01.14.13.01	Monitoring dan evaluasi	Jumlah Dokumen Laporan Monev	5	Dok	270.455.930	3	Dok		189.669.000,00	1	dok	00
51	4.01.4.01.14.14	<b>Program Rekonstruksi</b>	Prosentase Rekonstruksi sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	40	%	50.300.000.000	0,71	%	<b>967.799.424</b>	9,00	%	<b>12.000.000</b>	
52	4.01.4.01.14.14.01	Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	100	Keg	300.000.000	71	Keg	899.544.800	20	Keg	00	
53	4.01.4.01.14.14.02	Pembangunan sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana umum	50	Paket	50.000.000.000	-	Paket	68.254.624	11	Paket	12.000.000	

54	4.01.4.01.14.15	<b>Program Kesiapsiagaan</b>	Persentase ketersediaan system kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	100	%	1.762.632.022	54	%	<b>1.012.130.000</b>	13	%	<b>536.866.</b>
55		Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana		1	Dok	50.000.000	1	Dok	11.709.500	0		
56	4.01.4.01.14.15.01	Gladi tentang mekanisme tanggap darurat	Jumlah SDM terlatih dan mekanisme kedaruratan yang teruji	100	Orang	330.194.333	50	Orang	97.579.500	30	Orang	90
57	4.01.4.01.14.15.02	Pembentukan Kelurahan Tangguh	Jumlah kelurahan tangguh bencana	38	Kel	1.432.437.689	20	Kel	902.841.000	5	Kel	420
58	4.01.4.01.14.16	<b>Program Peringatan dini</b>	Persentase ketersediaan system peringatan Dini bencana	100	%	729.892.805	68,77	%	<b>364.238.726</b>	23	%	<b>264.985.</b>
59	4.01.4.01.14.16.01	Mengamati gejala bencana	Jumlah data hasil pengamatan	5	Dok	116.025.000	1	Dok	23.759.726	1	dok	30

60	4.01.4.01.14.16.02	Menyebarkan informasi potensi bencana	Jumlah jenis penyebaran informasi	35	Paket	613.867.805	24	Paket	<b>340.479.000</b>	8	jenis media penyebaran	100
				87,14	%	103.647.340.544,00	52,05	%	9.841.889.062,00	26,05	%	15.820.300



## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

### **2.2.1. Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Bima**

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut :

**Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Bima  
Periode tahun 2014 dan tahun 2015 dan proyeksi tahun 2016**

Nomor	Indikator Capaian			TARGET PENCAPAIAN			PROYEKSI TAHUN	
	Indikator Capaian	Penjelasan	Satuan	Target Renstra	capaian tahun 2014	Capaian sampai dengan tahun 2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SDM yang terlatih dan profesional	Jumlah SDM yang terlatih dan professional	Orang	870	197	22.64	180	180
2	Tersedianya dokumen (Anris,Perda PB, Peta Daerah Rawan, Renkon, RPB, SOP, RAD	Jumlah Dokumen yang tersedia	Dokumen	10	3	20.00	2	1
3	Terbentuknya Desa/Kel tangguh bencana	Jumlah Kelurahan tangguh	Kelurahan tangguh %	38	0	0.00	10	7
4	Korban bencana dapat tertangani (Kebutuhan dasarnya	Prosentase Jumlah korban bencana yang bisa ditangani (kebutuhan dasarnya) dengan peralatan lengkap per 1000 penduduk		90	78.51	87.23	75	80
5		Persentase jumlah layanan aduan yang tidak lebih dari 15 menit	%	95	93.94	98.88	95	97
6		Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	95	79.28	83.45	90	93
7		Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	90	0	0.00	75	80
8		Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK	%	95	100	105.26	90	90
9	Sarana prasarana fisik dan non fisik pasca bencana dapat direhab dan rekon	Prosentasi jumlah sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang rusak pasca bencana	%	90	5	5.56	50	55
Rata – rata					74,25	47,00		



## 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

### 1. Tingkat kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

Tingkat kinerja pelayanan BPBD selama dua tahun terakhir menunjukkan penurunan, tingkat capaian kinerja BPBD selama tahun 2014 rata – rata sebesar 74,25 %, jika dibandingkan dengan tahun 2013 tingkat capaiannya memang cukup rendah mengingat perhitungan capain tahun 2013 memasukkan unsur bantuan donor ke dalam kinerja SKPD. Capaian tahun 2013 sebesar 121% melampaui target tahun yang bersangkutan . Dalam rangka pelayanan kinerja Badan Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima selama tahun 2014 didukung oleh 49 pegawai yang terdiri dari 39 Pegawai Negeri Sipil dan 10 pegawai tidak tetap. Jumlah pegawai, pendidikan, golongan dan jabatannya sesuai tabel berikut ;

1. Jumlah PNS dan Non PNS Badan penanggulangan Bencana berjumlah 39 orang dengan rincian sesuai table berikut :

Tabel 3.2. Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Pegawai	Jumlah	%
1	PNS	29	74,36
2	CPNSD	-	
3	Honorer	10	25,64
	Total	39	100

2. Susunan Pegawai berdasarkan :

- a. Golongan :

Tabel 3.2. Susunan Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	
		PNS/NON PNS	CPNS
1	Golongan IV	4	-
2	Golongan III	19	-
3	Golongan II	6	-
4	Golongan I	0	-
5	Non Golongan	10	
	Total	39	-

- b. Jabatan Struktural :

Tabel 3.3. Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	9
	Jumlah	14

## c. Tingkat Pendidikan :

Tabel 3.4. Susunan Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pegawai	Jumlah	%
1	S3	-	
2	S2	4	10,26
3	S1	17	43,59
4	D3	2	5,13
5	SMA/Sederajat	16	41,03
6	SMP/Sederajat	0	0
7	SD/Sederajat	0	0
	Total	39	100

Berdasarkan analisa kebutuhan personil bagi instansi, jumlah personil tersebut masih terbatas untuk melayani kebutuhan masyarakat , Analisa kebutuhan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Analisa Kebutuhan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Jabatan	Sudah Terisi	Belu m Terisi	Keterangan
1.	Kepala Pelaksana	√		
2.	Sekretaris	√		
	a. Kasubag Umum dan Kepegawaian	√		

	Staf	√		Kurang 2 org
	b. Kasubag Keuangan	√		
	Staf	√		Cukup
	c. Kasubag Program	√		
	Staf	√	√	Kurang 1 org
3.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	√		
	a. Kasi Pencegahan	√		
	Staf		√	Kurang 1 org
	b. Kasi Kesiapsiagaan	√		
	Staf		√	Kurang 1 org
4.	Kabid Kedaruratan dan Logistik		√	
	a. Kasi Tanggap Darurat	√		
	Staf	√		Kurang 1 org
	b. Kasi Logistik	√		
	Staf		√	Kurang 1 org
5.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi		√	
	a. Kasi Rehabilitasi	√		
	Staf		√	Kurang 1 org
	b. Kasi Rekonstruksi	√		
	Staf		√	Kurang 2 org

## 2. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

### Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM yang terlatih dalam pelaksanaan Program kerja BPBD;
2. Kurangnya Tenaga /Personil sehingga pekerjaan yang penting sering tidak bisa diselesaikan dengan cepat sehingga menghambat semua kegiatan;

3. Koordinasi dengan beberapa Stakeholder masing sangat kurang terutama pada penyelesaian tugas – tugas pasca bencana
4. Kurangnya sarana prasarana pendukung

### **Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi**

1. Koordinasi yang masih parsial dengan beberapa stakeholder sehingga menghambat dalam proses pelayan publik;
2. Tingkat pemahaman Aparatur pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal terutama pada fungsi pemadam kebakaran;
3. Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas belum terwujud dengan baik;
5. Keterlambatan pencairan dana terutama dana tak terduga sehingga menyebabkan terhambatnya pelayanan kedaruratan bagi korban bencana.

### **3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

1. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan sulit diciptakan.
2. Belum adanya pemahaman yang sama terhadap penanggulangan bencana menyebabkan terhambatnya pencapaian sasaran yang ingin dicapai yaitu masyarakat yang mandiri

### **4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan**

#### **Tantangan**

- Terjadinya ancaman bencana yang cukup tinggi
- Terjadinya bencana banjir yang cukup besar sehingga menyebabkan kerusakan dan kerugian hampir di semua sektor
- Sarana Prasarana pendukung kelancaran pekerjaan pelayanan kurang memadai
- Pendanaan masih kurang memadai
- Masih adanya ego sektoral atau penanganan masih sektoral

#### **Peluang**

- Semangat mau bekerja sangat tinggi
- Adanya komitmen pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana yang terbukti dengan lahirnya Perda Penanggulangan Bencana yang tertuang di dalamnya komitmen pemerintah untuk menyediakan dana minimal 1 % dari belanja langsung APBD untuk anggaran penanggulangan bencana
- Kemajuan teknologi informasi sebagai salah satu peluang eksternal untuk membuka wawasan pemikiran bagi aparatur dalam rangka peningkatan kualitasnya

- Adanya dukungan dari SKPD terkait dalam menyelesaikan tugas tugas pelayanan kedaruratan
- Terbentuk dan aktifnya Forum PRB " Matenggo" Kota Bima dan TSBK di 20 Kelurahan.
- Mulai adanya keikutsertaan Lembaga usaha dalam rangka penanggulangan bencana yang dulu hanya focus pada tanggap darurat akan tetapi sekarang mulai memperhatikan program – program penanganan pra dan pasca bencana
- Mulai banyaknya perhatian Kementerian/ lembaga dan perguruan tinggi dan lembaga lainnya untuk menata kembali Kota pasca bencana banjir

### **Kekuatan**

- Dukungan dan persetujuan Pemerintah terhadap rencana program dan Kegiatan;
- Koordinasi yang relative baik antara Instansi terkait dilingkungan pemerintah Kota Bima melalui Tim Teknis dan Tim Koordinasi SKPD Terkait Kota Bima;
- Personil Pegawai yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk maju dan penuh tanggung jawab;
- Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2010 tentang pembentukan BPBD Kota Bima
- Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Bima
- Adanya legalisasi Peraturan walikota Bima tentang pemanfaatan dana tak terduga
- Adanya legalisasi peraturan Walikota Bima tentang pedoman Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana minimal 1% dari belanja langsung APBD
- Adanya Legalisasi Peraturan Walikota Bima tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

### **Kelemahan**

- Belum optimalnya anggaran dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana untuk mendukung program dan kegiatan BPBD terutama kegiatan Pasca Bencana
- Kurangnya Kuantitas dan kualitas keterampilan Pegawai, baik yang Profesional secara Teknis maupun Operasional;
- Teknologi Informasi belum dimanfaatkan secara optimal.
- Masih Kurangnya aturan – aturan turunan daerah tentang penanggulangan bencana, baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana

## **5. Isu-Isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima**

- Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam hal penanggulangan bencana
- Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam usaha – usaha pengurangan risiko bencana
- Masih kurangnya legitimasi hukum peraturan – peraturan turunan Peraturan daerah Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam mengatur tata kelola manajemen pengurangan resiko bencana di Daerah

- Masih kurangnya dokumen pendukung sebagai acuan pelaksanaan penanggulangan bencana
- Terbatasnya anggaran Penanganan Pasca Bencana mengingat biaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sangat besar

## 6. Rekomendasi – rekomendasi dan catatan strategis

- Perlunya peningkatan SDM aparatur, Tim Penanggulangan Bencana dan masyarakat melalui Pelatihan structural, pelatihan fungsional, penyuluhan penanggulangan bencana dan pelatihan dan gladi/simulasi bencana.
- Mendorong pelaksanaan Rencana aksi daerah penanggulangan bencana yang telah tertuang dalam Peraturan Walikota Bima tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana banjir tanggal 21 dan 23 Desember 2016 dalam rangka meningkatkan komitmen semua pihak baik swasta, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana (Pra bencana , Tanggap darurat dan pasca bencana);
- Memperbesar anggaran penanggulangan bencana terutama pada program – program Pengurangan Risiko Bencana karena investasi yang besar pada program pengurangan risiko bencana akan dapat menghemat anggaran 4 – 7 kali lipat dibandingkan biaya yang keluar untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian jika bencana telah terjadi
- Perlunya pengintegrasian yang maksimal terhadap program Pengurangan Risiko Bencana kedalam RKPD Kota Bima sebagai upaya mengurangi dampak bencana mengingat tingginya ancaman bencana di Kota Bima terutama bencana banjir dan tanah longsor
- Terus melakukan program menuju ketangguhan bencana sebagai upaya peningkatan kemandirian dan peran serta masyarakat ditingkat paling bawah dalam upaya – upaya pengurangan risiko bencana.
- Terus melakukan koordinasi sektoral untuk meningkatkan upaya – upaya baik pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

## 2.4. REVIEW TERHADAP RKPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima tahun 2013 – 2018 yang sedang berjalan, berdasarkan visi dan misi Walikota/Wakil Walikota terpilih dengan menyesuaikannya dengan Rencana Pembangunan selanjutnya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD tersebut selanjutnya menjadi acuan penyusunan Renstra SKPD yang kemudian setiap tahunnya dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD dan menjadi acuan penyusunan RKPD . Terkait dengan Program kerja pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana, RPJMD tahun 2014-2018 secara signifikan telah menetapkan Program Pengurangan Risiko Bencana pada Program prioritas Daerah, Di Dalam dokumen Draf RKPD tahun 2018 telah menuangkan program penanggulangan bencana sebagai program prioritas ke 8 yaitu ***Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penanganan perubahan iklim***, hal ini menjadi catatan bagi BPBD sebagai leading sector

terkait penanggulangan bencana harus berjuang keras untuk mendukung dengan langkah – langkah program yang sangat strategis dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang cepat, tepat dan menyentuh kebutuhan masyarakat dalam rangka kemandirian masyarakat baik sebelum, saat bencana maupun pasca bencana.

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sampai dengan tahun 2017 Badan Penanggulangan bencana daerah telah banyak menerima usulan program dan kegiatan Masyarakat baik yang secara langsung melalui tatap muka dengan masyarakat melalui fasilitasi kegiatan Pembentukan kelurahan tangguh maupun melalui Surat dan Proposal, Hasil kunjungan Dewan dan Pertemuan Forum SKPD. Berdasarkan hasil pertemuan forum SKPD dalam rangkaian musrembang untuk sinkronisasi program butem up dan top down, sebagian besar program yang diajukan masyarakat dapat terakomodir dalam program Renja BPBD ini mengingat isu – isu yang diangkat hampir sama namun belum terpenuhi hingga 100%. Selain itu program pembentukan kelurahan tangguh yang dilaksanakan sejak tahun 2014 telah melahirkan Dokumen rencana aksi masyarakat, dimana dokumen tersebut memuat program dan kegiatan pengurangan risiko bencana terutama pada kelurahan yang telah terbentuk menjadi kelurahan tangguh. Sebagian besar rencana aksi masyarakat tersebut telah disampaikan melalui musrembang tingkat Kelurahan maupun tingkat kecamatan dan menjadi issue penting yang ditindak lanjuti BPBD melalui rencana kerja ini.

Program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat adalah antara lain :

1. Program Penanganan bencana banjir yang kerap terjadi dan sering menggenangi disebagian besar Wilayah Kota Bima;
2. Bronjongisasi di sepanjang sungai : seperti Wilayah Manggemaci, Paruga (Sungai Padolo), Wilayah Dodu (Sungai Dodu), Wilayah SambinaE (Sungai SambinaE);
3. Perbaikan Drainase di Sebagian besar Wilayah Kota Bima.
4. Pembuatan sumur resapan di beberapa lokasi rawan banjir dan kekeringan.
5. Normalisasi sungai Padolo, sungai romo, Sungai Dodu dll.
6. Peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.
7. Pembangunan drainase
8. Penanganan darurat bencana yang terjadi seperti banjir, kekeringan, kebakaran, angin kencang dll
9. Penghijauan di daerah hulu

Program dan kegiatan yang bersifat fisik adalah merupakan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan SKPD teknis seperti Dinas PU Pertamben, Dinas kebersihan dan Pertamanan, Dinas Tata Kota dan Perumahan dan dinas teknis terrkait lainnya, sehingga tugas BPBD Kota bima adalah mengkoordinasikan tugas tugas tersebut dengan SKPD terkait sedangkan tugas penanggulangan bencana non fisik didorong untuk masuk menjadi rencana kerja BPBD tahun 2018 yang tertuang dalam matriks rencana kerja ini.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN



#### **4.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengamanatkan berjalannya upaya – upaya penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana sehingga terbentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2008 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk di Tingkat Daerah bertugas mengurus dan merencanakan program – program penanggulangan bencana di tingkat daerah dengan berpedoman pada aturan – aturan yang sudah ada.

Berdasarkan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional terdapat 7 (Tujuh) point, poin yang ke empat adalah **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim**. Arah kebijakan tersebut dapat ditempuh melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. arah kebijakan tersebut menjadi pedoman rujukan dalam penyusunan program – program yang tertuang di dalam RPJMN Daerah maupun Rencana Strategis SKPD BPBD dan Instansi yang terkait lainnya yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan SKPD.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD**

#### **3.2.1. Tujuan**

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2014-2018 maka tujuannya adalah:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur dan Tim penanggulangan bencana dalam penanganan bencana secara cepat dan tepat

2. Meningkatkan peran serta pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam mengembangkan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penanganan bencana dan terwujudnya kemandirian masyarakat dalam menghadapi kondisi bencana
4. Meminimalisir risiko akibat bencana
5. Terkoordinasinya pelaksanaan pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana

### **3.2.2. SASARAN STRATEGIS**

Di dalam mewujudkan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima ditempuh melalui 7 (tujuh) sasaran strategi yaitu :

- a. Terwujudnya peningkatan SDM aparatur dan Tim Penanggulangan bencana
- b. Terwujudnya upaya – upaya penanggulangan bencana secara terencana, dan menyeluruh melalui peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program – program Penanggulangan bencana
- c. Terwujudnya tingkat kesadaran dan kemampuan serta kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana
- d. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, efektif, terkoordinir dan terpadu
- e. Terwujudnya koordinasi pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh

## **3.3 Program dan Kegiatan**

### **3.3.1. Rencana Kinerja BPBD**

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dan sebagai tolok ukur pencapaian program dan kegiatan tahun 2018 maka ditetapkan rencana kinerja BPBD tahun 2014-2018 sesuai tabel berikut :

### RENCANA KINERJA BPBD TAHUN 2014-2018

VISI	MISI	TUJUAN MISI	SASARAN MISI				TARGET					TARGET PENCAPAIAN		
			SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	Target Rens tra	capaian tahun 2015	Capaian sampai dengan tahun 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
<b>TERWUJUDNYA KOTA BIMA YANG TANGGUH DAN MANDIRI MELALUI PENANGANAN BENCANA YANG TANGGAP, CEPAT DAN TEPAT</b>	Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dalam penanganan bencana secara cepat dan tepat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dan Tim Penanggulangan bencana dalam penanganan bencana secara cepat dan tepat	Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur dan Tim Penanggulangan bencana	SDM yang terlatih dan profesional	Jumlah SDM yang terlatih dan profesional	Orang	150	180	180	180	180	870	204	46,09
	Meningkatkan Koordinasi dalam Penanganan Bencana dengan Instansi terkait.	Meningkatkan peran serta pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam mengembangkan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh di wilayah Kota Bima	Terwujudnya upaya - upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh melalui peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program-program Penanggulangan bencana	Tersedianya dokumen (Anris,Perda PB, Peta Daerah Rawan, Renkon, RPB, SOP, RAD	Jumlah Dokumen yang tersedia	Dokumen	3	2	1	2	2	10	3	50,00
	Meningkatkan Kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi	Peningkatan Peran aktif Masyarakat dalam Penanganan Bencana dan	Terwujudnya tingkat kesadaran dan kemampuan serta kemandirian masyarakat dalam	Terbentuknya Desa/Kel tangguh bencana	Jumlah Kelurahan tangguh	Kelurahan tangguh		6	10	8	7	7	38	9

bencana melalui peningkatan peran serta stakeholder	terwujudnya kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana	menghadapi bencana												
penanggulangan Terwujudnya penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat, tepat dan efektif terkoordinir dan/terpadu	menghadapi Meminimalisir resiko akibat bencana	Mendorong terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat, tepat dan efektif terkoordinir dan/terpadu	Korban bencana dapat tertangani (Kebutuhan dasarnya)	Prosentase Jumlah korban bencana yang bisa ditangani (kebutuhan dasarnya) dengan peralatan lengkap per 1000 penduduk	%	50	60	70	80	90	90	78.51	87.23	
				Persentase jumlah layanan aduan yang tidak lebih dari 15 menit	%	93	95	95	95	95	95	95	95	
				Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	87	90	95	95	95	95	88,09	88,09	
				Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	70	75	80	85	90	90	3,33	3,33	
				Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK	%	90	90	95	95	95	95	100	100	

Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh	Tersedianya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh	Sarana prasarana fisik dan non fisik pasca bencana dapat direhab dan rekon	Prosentasi jumlah sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang rusak pasca bencana	%	50	60	70	80	90	90	55	55
Rata - rata Pencapaian					77,45								

### **3.3.2. Rencana Program dan Kegiatan**

Berdasarkan rencana kinerja dan indikator kinerja kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima serta telaahan isu – isu strategis serta rekomendasi - rekomendasi dan catatan strategis maka dapat tindak lanjuti melalui 15 program dan 45 kegiatan selama tahun 2016

Program pokok yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana
6. Program Penanggulangan bencana/ pencegahan bencana
7. Program peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
8. Program Pengkajian Secara Cepat dan Tepat
9. Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar
10. Program Rehabilitasi
11. Program Rekonstruksi
12. Program Kesiapsiagaan:
13. Program Peringatan Dini.
14. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

#### 15. Program Penataan Peraturan Perundang – undangan

Program dan kegiatan dapat dilihat pada Matrik Rencana Kerja BPBD Kota Bima Tahun 2017 pada lampiran RENJA ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2017 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BPBD Kota Bima dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Dalam melaksanakan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Kerja ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dengan penganggaran yang sesuai dengan peruntukannya sehingga secara konsisten dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Raba-Bima, April 2016

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Bima

Kepala Pelaksana

**Ir. H. Sarafuddin, MM**  
NIP. 19640715 199203 1 017



